IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM MEWUJUDKAN KETEPATAN SASARAN BAGI PETANI PADI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Angga Dwi Prawira
Npp. 33.0061
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: dwiprawira002@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Romi Saputra, S.Sos., M.Si
Email: romisaputra@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study focuses on the implementation of subsidized fertilizer distribution policies for rice farmers in Serdang Bedagai Regency. Previous studies generally discussed the effectiveness and impacts of subsidized fertilizers on agricultural productivity, while studies specifically analyzing the implementation of subsidized fertilizer distribution policies using Knill and Tosun's theory (2020) remain limited. In practice, several problems are still found, such as delays in fertilizer distribution, discrepancies in farmer data within the e-RDKK system, limited fertilizer allocation, and the mismatch between farmers' fertilizer needs and fertilizer availability in the field.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to analyze the implementation of subsidized fertilizer distribution policies for rice farmers in Serdang Bedagai Regency.* ***Method:*** *This study used a qualitative descriptive method with policy implementation analysis based on Knill and Tosun's theory (2020). Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of officials from the Agriculture Office, agricultural extension workers, distributors, subsidized fertilizer retailers (PPTS), farmer group leaders, and rice farmers. Data validity was tested using triangulation techniques.* ***Result:*** *The findings of this study indicate that the implementation of subsidized fertilizer distribution policies in Serdang Bedagai Regency has generally been carried out quite well in terms of policy design, institutional arrangements, and coordination among actors. The use of digital systems such as e-RDKK and i-Pubers has helped improve transparency and control in subsidized fertilizer distribution. Coordination among the Agriculture Office, agricultural extension workers, distributors, retailers, and farmer groups also supports the smooth distribution process. However, several obstacles were still identified, including delays in fertilizer distribution during the planting season, discrepancies in farmer data within the e-RDKK system, limited fertilizer quotas, and the uneven understanding of technology use among implementers and farmers. In addition, some rice farmers stated that the amount of subsidized fertilizer received was still insufficient to meet their agricultural needs.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of subsidized fertilizer distribution policies for rice farmers in Serdang Bedagai Regency has been carried out quite well, but has not yet been fully optimal in terms of timeliness, allocation accuracy, and the validity of subsidized fertilizer recipient data.*

Keywords: *e-RDKK; Policy Implementation; Rice Farmers; Serdang Bedagai Regency; Subsidized Fertilizer Distribution*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas dan dampak pupuk bersubsidi terhadap produktivitas pertanian, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan teori Knill dan Tosun (2020) masih terbatas. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterlambatan distribusi pupuk, ketidaksesuaian data petani dalam sistem e-RDKK, keterbatasan alokasi pupuk, serta belum sesuainya kebutuhan pupuk petani dengan ketersediaan di lapangan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis implementasi kebijakan menurut teori Knill dan Tosun (2020) . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, distributor, pengecer pupuk bersubsidi (PPTS), ketua kelompok tani, dan petani padi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai secara umum telah berjalan cukup baik pada aspek desain kebijakan, kelembagaan, dan koordinasi antaraktor. Penggunaan sistem digital e-RDKK dan i-Pubers membantu meningkatkan transparansi dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi. Koordinasi antara Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, distributor, pengecer, dan kelompok tani juga mendukung kelancaran penyaluran pupuk. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan distribusi pupuk pada musim tanam, ketidaksesuaian data petani dalam e-RDKK, keterbatasan kuota pupuk, serta belum meratanya pemahaman penggunaan teknologi oleh pelaksana maupun petani. Selain itu, sebagian petani padi menyatakan jumlah pupuk bersubsidi yang diterima belum mencukupi kebutuhan pertanian mereka. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal pada aspek ketepatan waktu, ketepatan jumlah alokasi, dan validitas data penerima pupuk bersubsidi.

Kata kunci: Distribusi Pupuk Bersubsidi; e-RDKK; Implementasi Kebijakan; Kabupaten Serdang Bedagai; Petani Padi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi pertanian yang besar dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan nasional, khususnya beras, juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, subsektor tanaman pangan khususnya padi masih menjadi komoditas utama yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional (BPS, 2025). Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi melalui kebijakan pembangunan pertanian, salah satunya melalui kebijakan pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu petani memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau guna menunjang produktivitas pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, serta mengurangi beban biaya produksi petani, khususnya petani padi. Dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk bersubsidi diatur melalui

berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem digital seperti elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan i-Pubers untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi (Kementrian Pertanian, 2024).

Kebijakan subsidi input pertanian tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan pertanian di berbagai negara berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kecil. Kemudian Jayne et al. (2018) menjelaskan bahwa program subsidi input pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, mekanisme distribusi, serta kapasitas kelembagaan pelaksana.

Sejalan dengan hal tersebut, Liverpool-tasie et al. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan pupuk bersubsidi dapat meningkatkan produktivitas pertanian apabila didukung oleh sistem distribusi yang efektif dan akses petani yang memadai terhadap input pertanian. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran subsidi, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Sheahan & Barrett (2017) menjelaskan bahwa penggunaan input pertanian di negara berkembang masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan keterjangkauan, ketersediaan, dan efektivitas pemanfaatan input oleh petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi pupuk tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas mekanisme distribusi hingga tingkat petani.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, khususnya pertanian padi. Kondisi tersebut menjadikan pupuk bersubsidi sebagai salah satu kebutuhan penting bagi petani dalam menunjang aktivitas produksi pertanian. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, luas lahan pertanian padi dan jumlah petani padi di daerah ini masih tergolong tinggi sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi juga terus meningkat setiap musim tanam (BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2025). Namun, dalam pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti keterlambatan distribusi pupuk pada musim tanam, keterbatasan alokasi pupuk, ketidaksesuaian data petani dalam sistem e-RDKK, serta belum sesuainya jumlah pupuk yang diterima dengan kebutuhan riil petani padi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Padahal, implementasi kebijakan yang baik sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kejelasan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor, kapasitas pelaksana, ketersediaan sumber daya, kepatuhan pelaksana, serta kondisi sosial dan politik masyarakat (Knill & Tosun, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai agar dapat diketahui berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena distribusi pupuk bersubsidi memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas pertanian padi dan kesejahteraan petani. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterlambatan distribusi, keterbatasan alokasi pupuk, serta ketidaksesuaian data petani dalam sistem e-RDKK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam mendukung kebutuhan petani di lapangan (Badan Pusat Statistik, 2025)

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan seperti regulasi tata kelola pupuk bersubsidi serta sistem digital e-RDKK dan i-Pubers untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek koordinasi antaraktor, akurasi data, serta ketepatan waktu distribusi pupuk yang berdampak pada efektivitas kebijakan (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025)

Selain itu, berbagai penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi maupun dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan petani (Sembiring et al., 2025; Hamidah et al., 2022), sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan perspektif teori Knill dan Tosun (2020) masih relatif terbatas.

Selain itu, kajian internasional mengenai subsidi input pertanian menunjukkan bahwa persoalan implementasi masih menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan kebijakan. Jayne et al. (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan pupuk tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan input, tetapi juga oleh faktor ekonomi petani dan efektivitas tata kelola kebijakan pendukung. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dijalankan pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara itu, Holden (2019) menjelaskan bahwa penggunaan pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, khususnya di negara berkembang. Namun, keberhasilan pemanfaatan pupuk tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan input, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, kelembagaan, dan sistem distribusi yang efektif. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada hubungan antara penggunaan pupuk dan produktivitas pertanian, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) masih terbatas. Kondisi inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini.

Menurut Knill & Tosun (2020), keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh koordinasi aktor, kapasitas pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi secara langsung di tingkat daerah.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produktivitas petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai. Secara keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian implementasi kebijakan publik dengan menggunakan perspektif teori Knill dan Tosun (2020) yang menekankan pentingnya desain kebijakan, aktor pelaksana, kapasitas sumber daya, serta konteks sosial-politik dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Knill & Tosun, 2020).

Pentingnya penelitian implementasi kebijakan juga didukung oleh pandangan Labolo (2017) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan, koordinasi antaraktor, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani.

Secara empiris, penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat berbagai permasalahan di lapangan seperti keterlambatan distribusi pupuk, ketidaksesuaian data petani dalam sistem e-RDKK, serta keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat produktivitas pertanian dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani apabila tidak segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat (Kementrian Pertanian, 2024).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, mengenai kondisi aktual implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam memperbaiki sistem distribusi, meningkatkan ketepatan sasaran, serta memperkuat koordinasi antaraktor pelaksana kebijakan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami secara komprehensif permasalahan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang diambil kurang tepat sasaran, tidak efektif, serta berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan riil petani di lapangan, sehingga tujuan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani menjadi kurang optimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian dengan pendekatan, metode, dan fokus kajian yang berbeda-beda.

Penelitian Hamidah et al. (2022) membahas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang dengan pendekatan Manajemen Strategi dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk belum efektif karena ketidaktepatan data RDKK, lambatnya realisasi, dan lemahnya pengawasan. Sembiring (2024) meneliti dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi mampu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani, namun pengurangan alokasi pupuk dapat meningkatkan beban biaya usahatani. Rahmadhani & A'ari (2025) mengkaji implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bungaraya dengan metode kualitatif dan teori Meter & Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum optimal akibat masalah data RDKK, keterbatasan akses teknologi, dan ketidaksesuaian kebutuhan pupuk. Nuryanti et al. (2023) meneliti efektivitas distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 tepat dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan distribusi cukup efektif, namun masih terdapat kelemahan pada aspek harga.

Kemudian, Irmalasari et al. (2024) mengkaji implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sinjai dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala berupa ketidakmerataan distribusi, kelangkaan pupuk, serta keterbatasan akses bagi petani non-RDKK.

Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian pupuk bersubsidi banyak berfokus pada efektivitas, dampak ekonomi, dan kendala implementasi, namun masih

terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan perspektif Knill dan Tosun (2020) pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai

.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan penelitian terdahulu baik dari segi objek, pendekatan teori, maupun fokus analisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai objek kajian, yang belum banyak diteliti secara mendalam pada level kabupaten dengan pendekatan implementasi kebijakan yang komprehensif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada efektivitas kebijakan atau dampak ekonomi pupuk bersubsidi terhadap pendapatan petani, penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif teori Knill dan Tosun (2020) yang menekankan pada dimensi desain kebijakan, aktor pelaksana, sumber daya, serta konteks sosial-politik dalam implementasi kebijakan publik.

Kebaruan lainnya terletak pada fokus analisis yang mengintegrasikan penggunaan sistem digital e-RDKK dan i-Pubers dalam proses distribusi pupuk bersubsidi, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai transformasi digital dalam tata kelola kebijakan publik di sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada sektor distribusi pupuk bersubsidi di tingkat daerah.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif, khususnya terkait proses kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor, dinamika lapangan, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan (Creswell & Poth (2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung dari para pelaksana kebijakan dan penerima manfaat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses distribusi pupuk bersubsidi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti regulasi, laporan dinas, serta data e-RDKK dan i-Pubers.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, karena memiliki kewenangan dalam perumusan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Informan lainnya meliputi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), distributor pupuk bersubsidi, pengecer resmi (PPTS), serta petani padi sebagai penerima

manfaat. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari sisi perumus kebijakan, pelaksana teknis, hingga penerima manfaat kebijakan.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (pemerintah, pelaksana, dan petani), sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, digunakan juga teknik *member check* untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) yang mencakup aspek desain kebijakan, aktor pelaksana, sumber daya, serta konteks sosial-politik dalam implementasi kebijakan publik.

Pendekatan implementasi kebijakan juga sejalan dengan pandangan Pendekatan implementasi kebijakan dalam penelitian ini juga sejalan dengan Dione & Faradina (2020) menjelaskan bahwa koordinasi antaraktor pemerintahan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan pembangunan daerah. Koordinasi yang efektif memungkinkan terjadinya sinkronisasi tugas, pertukaran informasi, serta penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi antara Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, distributor, pengecer, dan kelompok tani berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Toana (2018) menegaskan bahwa kepemimpinan situasional memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, karena pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi organisasi dan karakteristik pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, kepemimpinan dan koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, distributor, pengecer, dan kelompok tani sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus penelitian pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dan wilayah sentra produksi padi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Januari sampai dengan 24 Januari 2026. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan verifikasi data untuk mendukung analisis mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Knill & Tosun, 2020). Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh desain kebijakan, aktor pelaksana, sumber daya, serta kondisi implementasi yang terjadi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap para informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

3.1 Desain Kebijakan

Desain kebijakan merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan arah, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan yang akan dijalankan oleh para pelaksana kebijakan. Menurut Knill dan Tosun (2020), desain kebijakan yang baik ditandai dengan kejelasan tujuan, ketepatan instrumen kebijakan, serta adanya pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi,

desain kebijakan diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengatur mekanisme pendataan penerima manfaat, penetapan alokasi pupuk, hingga proses penyaluran kepada petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, diketahui bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi telah memiliki dasar hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, serta petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi mulai dari proses pendataan petani, penetapan alokasi pupuk, hingga penyaluran kepada penerima manfaat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan distribusi pupuk bersubsidi adalah menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang terjangkau guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai instrumen utama dalam pendataan petani dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem Integrasi Pupuk Bersubsidi (i-Pubers) sebagai sarana pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk secara digital agar penyaluran pupuk dapat dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran pupuk dilakukan melalui jalur resmi mulai dari distributor, pengecer, hingga kelompok tani dan petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK. Sementara itu, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital telah membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi pupuk bersubsidi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait validitas data petani dan kesesuaian antara kebutuhan riil petani dengan alokasi pupuk yang diterima. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani belum memperoleh pupuk sesuai kebutuhan lahannya. Dengan demikian, meskipun desain kebijakan telah dirumuskan secara jelas dan didukung oleh instrumen digital, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Rahmadanita et al. (2018) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berbasis teknologi membutuhkan dukungan kelembagaan, kesiapan aparatur, serta sistem informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi, keberadaan sistem e-RDKK dan i-Pubers menjadi instrumen kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki tata kelola distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Jayne et al. (2018) yang menjelaskan bahwa keberhasilan program subsidi input pertanian sangat dipengaruhi oleh ketepatan mekanisme penentuan penerima manfaat serta kemampuan pemerintah dalam mengelola sistem distribusi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana sistem e-RDKK dan i-Pubers telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek validasi data dan penyesuaian kebutuhan petani. Selanjutnya, Kusuma et al. (2021) menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik apabila didukung oleh kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung yang memadai. Hal tersebut sejalan dengan penerapan e-RDKK dan i-Pubers dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai yang bertujuan meningkatkan akurasi data penerima dan transparansi proses penyaluran.

Dengan demikian, aspek desain kebijakan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, terutama melalui penggunaan regulasi dan instrumen digital sebagai mekanisme pengendalian distribusi. Namun, keberhasilan desain kebijakan masih membutuhkan penguatan pada aspek pemutakhiran data agar kebijakan yang dirancang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan petani di Kabupaten Serdang Bedagai.

3.2 Tata Kelembagaan

Tata kelembagaan merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, serta hubungan kerja antarorganisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Knill dan Tosun (2020), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan struktur kelembagaan yang mampu menciptakan koordinasi dan sinergi antaraktor pelaksana. Dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, tata kelembagaan berfungsi untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai melibatkan berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Dinas Pertanian berperan dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, penyuluh pertanian lapangan berperan dalam melakukan pendampingan kepada petani, membantu proses penyusunan e-RDKK, serta memastikan informasi kebijakan dapat dipahami oleh kelompok tani.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa distributor dan pengecer resmi memiliki peran penting dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Distributor bertanggung jawab menyalurkan pupuk ke wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pengecer bertugas menyalurkan pupuk kepada petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antaraktor dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, distributor, pengecer, serta kelompok tani.

Berdasarkan hasil observasi, koordinasi kelembagaan dalam distribusi pupuk bersubsidi telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam proses pendataan, verifikasi kebutuhan pupuk, serta pengawasan penyaluran pupuk kepada petani. Hasil dokumentasi juga menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan kelompok tani dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor masih memerlukan penguatan, terutama dalam proses sinkronisasi data dan penyampaian informasi kepada petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas hubungan kerja dan koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Hal tersebut memperkuat penelitian Nurdin & Hartati (2024) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarorganisasi, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, serta kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan. Kondisi serupa ditemukan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana koordinasi antara Dinas Pertanian, penyuluh, distributor, dan kelompok tani menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dapat diterapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Thahir (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor pelaksana dalam memahami tugas, kewenangan, serta tanggung jawab implementasi kebijakan. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai, keterlibatan Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, distributor, dan kelompok tani menunjukkan bahwa

keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga kemampuan aktor pelaksana dalam menjalankan mekanisme kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari aspek tata kelembagaan telah berjalan cukup baik. Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antaraktor pelaksana telah mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

3.3 Aktor dan Kepentingan

Aktor dan kepentingan merupakan dimensi yang menjelaskan peran berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta kepentingan yang memengaruhi tindakan mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Knill dan Tosun (2020), implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan para aktor dalam menjalankan peran dan kepentingannya secara selaras dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai melibatkan berbagai aktor yang memiliki tugas dan kepentingan masing-masing. Dinas Pertanian berperan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di daerah yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pembinaan, serta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berperan dalam mendampingi kelompok tani, membantu proses penyusunan e-RDKK.

Selain itu, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi memiliki peran dalam menyalurkan pupuk kepada petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, kelompok tani dan petani sebagai penerima manfaat memiliki kepentingan untuk memperoleh pupuk bersubsidi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai kebutuhan usaha tani mereka. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh aktor tersebut dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi, hubungan antaraktor dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi telah berjalan melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Interaksi tersebut terlihat dalam proses pendataan petani, verifikasi kebutuhan pupuk, penyusunan e-RDKK, hingga proses penyaluran pupuk kepada petani. Hasil dokumentasi juga menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki posisi dan peran yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan peran masing-masing aktor, terutama yang berkaitan dengan pemutakhiran data petani dan pemanfaatan sistem digital pendukung distribusi pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam memahami dan melaksanakan mekanisme kebijakan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini sejalan Rahmadhani & A'ari (2025) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi masih menghadapi tantangan pada aspek akurasi data penerima dan kemampuan pelaksana dalam menggunakan sistem pendukung kebijakan. Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian ini, dimana penggunaan sistem e-RDKK dan i-Pubers telah membantu proses distribusi, tetapi masih membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab dinamika kebutuhan petani di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari aspek aktor dan kepentingan telah berjalan cukup baik. Berbagai aktor yang terlibat telah menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, peningkatan kapasitas pelaksana serta penguatan koordinasi antaraktor masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan petani secara optimal.

3.4 Sumber Daya dan Kapasitas

Sumber daya dan kapasitas merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dan pelaksana kebijakan dalam mendukung proses implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, ketersediaan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta kemampuan pelaksana dalam menjalankan tugas menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas aparatur Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, distributor, pengecer pupuk bersubsidi, kelompok tani, dan petani penerima manfaat. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perannya dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan kepada petani, membantu proses pendataan melalui e-RDKK, serta menyampaikan informasi terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan sarana pendukung berupa sistem e-RDKK dan i-Pubers yang digunakan dalam proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Keberadaan sistem tersebut membantu proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk kepada petani yang berhak menerima subsidi.

Berdasarkan hasil observasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Penyuluh pertanian secara aktif melakukan pendampingan kepada kelompok tani, sedangkan aparatur Dinas Pertanian melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, distributor dan pengecer juga melaksanakan proses penyaluran pupuk sesuai dengan alur distribusi yang telah ditetapkan.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi telah didukung oleh berbagai instrumen administrasi dan sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan dan penyaluran pupuk. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan di lapangan, terutama berkaitan dengan penyesuaian data kebutuhan pupuk petani dengan kondisi riil serta kemampuan sebagian petani dalam memahami mekanisme distribusi yang berbasis sistem digital.

Sejalan dengan Marenya dan Barrett (2009) menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian dipengaruhi oleh kondisi sumber daya yang dimiliki petani serta karakteristik lingkungan pertanian tempat kebijakan diterapkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pupuk tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pupuk, tetapi juga oleh kondisi implementasi dan karakteristik penerima manfaat.

Berdasarkan analisis peneliti, ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan sarana pendukung telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai. Akan tetapi, peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan kepada petani masih diperlukan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, pembaruan data secara berkala juga perlu dilakukan agar kebutuhan pupuk petani dapat terakomodasi secara lebih akurat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari aspek sumber daya dan kapasitas telah berjalan cukup baik. Dukungan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan sistem informasi telah membantu pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun demikian, peningkatan kapasitas pelaksana serta optimalisasi pemanfaatan sistem pendukung masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui sinergi kapasitas yang optimal tersebut, tujuan perluasan jangkauan dan pemerataan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

3.5 Kepatuhan dan Perilaku

Kepatuhan dan perilaku merupakan aspek yang berkaitan dengan sejauh mana aktor pelaksana maupun penerima manfaat melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, kepatuhan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan kepada petani yang berhak menerima sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai secara umum telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, distributor, dan pengecer melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis distribusi pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan data petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK dan mengacu pada alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kelompok tani dan petani penerima manfaat telah memahami prosedur memperoleh pupuk bersubsidi melalui mekanisme yang berlaku. Petani memperoleh pupuk bersubsidi melalui pengecer resmi dengan menunjukkan identitas dan data yang telah terdaftar dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa distribusi pupuk dilakukan sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar pelaksana kebijakan telah menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Hal tersebut terlihat dari penggunaan sistem e-RDKK dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat, serta pelaksanaan distribusi melalui jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian turut mendukung kepatuhan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidaksesuaian data petani, perubahan luas lahan garapan, serta kebutuhan pupuk yang lebih besar dibandingkan alokasi yang tersedia menjadi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil petani dengan jumlah pupuk yang diterima.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan upaya pengawasan dan pemutakhiran data guna menjaga kepatuhan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi. Penggunaan sistem digital juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan penyimpangan dalam proses penyaluran pupuk.

Berdasarkan analisis peneliti, tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan di Kabupaten Serdang Bedagai secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, peningkatan kualitas data penerima manfaat dan penguatan pengawasan masih diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari aspek kepatuhan dan perilaku telah berjalan cukup baik. Para pelaksana kebijakan dan penerima manfaat pada umumnya telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Akan tetapi, perbaikan pada aspek validitas data dan penguatan pengawasan masih diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

3.6 Konteks Sosial dan Politik

Konteks sosial dan politik merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Menurut Knill dan Tosun (2020), implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh kondisi

sosial, ekonomi, budaya, serta dukungan politik yang berkembang di lingkungan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Sebagian besar petani masih bergantung pada pupuk bersubsidi untuk menunjang kegiatan usaha tani karena harga pupuk nonsubsidi relatif lebih tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian petani. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi menjadi salah satu kebijakan yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan aktivitas pertanian di daerah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat petani pada umumnya memberikan respons positif terhadap keberadaan program pupuk bersubsidi karena dinilai mampu membantu mengurangi biaya produksi pertanian. Namun demikian, tingginya kebutuhan pupuk di tingkat petani sering kali tidak sebanding dengan alokasi pupuk yang tersedia, sehingga menimbulkan harapan masyarakat agar jumlah pupuk bersubsidi yang diterima dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan lahan pertanian yang mereka kelola.

Berdasarkan hasil observasi, dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi terlihat melalui keterlibatan aktif Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, serta kelompok tani dalam proses pendataan, sosialisasi, dan pengawasan distribusi pupuk. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan kelompok tani turut membantu proses penyampaian informasi terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui pemanfaatan sistem digital dan penguatan koordinasi antaraktor pelaksana. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang beragam serta tingginya kebutuhan pupuk di tingkat petani masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Perbedaan kebutuhan pupuk antarpetani, perubahan luas lahan garapan, serta dinamika kebutuhan pertanian pada setiap musim tanam memengaruhi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian dan pembaruan data secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis peneliti, Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pupuk bersubsidi serta dukungan pemerintah daerah menjadi faktor yang mendorong keberlangsungan implementasi kebijakan. Namun demikian, peningkatan akurasi data dan penyesuaian alokasi pupuk dengan kebutuhan riil petani tetap diperlukan agar kebijakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari aspek konteks sosial dan politik telah didukung oleh kondisi masyarakat pertanian yang membutuhkan pupuk bersubsidi serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, dinamika kebutuhan petani dan keterbatasan alokasi pupuk masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa mendatang.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek desain kebijakan, kelembagaan pelaksana, serta koordinasi antaraktor. Kebijakan yang dilaksanakan melalui sistem e-RDKK dan i-Pubers telah membantu meningkatkan transparansi dan ketepatan data serta perencanaan yang akurat dalam proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Sama halnya dengan temuan Sembiring (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, penelitian ini juga menemukan bahwa pupuk bersubsidi memberikan manfaat nyata bagi petani padi terutama dalam menekan biaya produksi. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan petani dan alokasi pupuk yang tersedia di lapangan.

Berbeda dengan penelitian Hamidah et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi belum efektif karena lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan RDKK, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan di Kabupaten Serdang Bedagai sudah lebih baik karena telah didukung oleh sistem digital dan koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala pada aspek ketepatan waktu distribusi dan validitas data petani.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Rahmadhani & A'ari (2025) yang menyatakan bahwa permasalahan utama dalam implementasi pupuk bersubsidi terletak pada data RDKK yang belum akurat serta keterbatasan akses teknologi di lapangan. Dalam penelitian ini, masalah serupa juga ditemukan, terutama pada ketidaksesuaian data petani yang berdampak pada tidak optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi.

Sementara itu, berbeda dengan penelitian Nuryanti et al. (2023) yang menilai distribusi pupuk bersubsidi cukup efektif berdasarkan prinsip 6 tepat, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem distribusi telah berjalan sesuai mekanisme, namun pada praktiknya masih belum tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga implementasi masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Irmalasari et al. (2024) yang menekankan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi masih menghadapi tantangan berupa ketidakmerataan distribusi dan keterbatasan akses petani terhadap sistem digital. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, dimana sebagian petani masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai berada pada kategori cukup baik namun belum optimal, terutama pada aspek ketepatan data, ketepatan waktu, dan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan petani.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah masih adanya keterlambatan distribusi, keterbatasan stok pada musim tanam, serta belum optimalnya pemutakhiran data petani dalam sistem e-RDKK. Namun di sisi lain, koordinasi antaraktor pelaksana menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga kelancaran distribusi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai telah berjalan cukup baik, namun belum optimal terutama pada aspek ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan validitas data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai sesuai dengan fokus analisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dalam mewujudkan ketepatan sasaran bagi petani padi di Kabupaten Serdang Bedagai

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu, akses data, dan cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu kabupaten sehingga belum dapat digeneralisasi secara lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work)* Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi studi serta mengkaji efektivitas sistem digital e-RDKK dan i-Pubers secara lebih mendalam agar diperoleh gambaran implementasi yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai beserta jajaran, para penyuluh pertanian, distributor, pengecer pupuk bersubsidi, serta para petani yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Harvested area, productivity, and production of paddy by province*. https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTQ5OCMy/harvested-area--productivity--and-production-of-paddy-by-province.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai. (2025). *Kabupaten Serdang Bedagai dalam angka 2025*. https://serdangbedagaikab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/14e66a330e35d9071e3cd0eb/kabupaten-serdang-bedagai-dalam-angka-2025.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Provinsi Sumatera Utara dalam angka 2025*. https://sumut.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/eb64d25aa56a75d579156d6a/provinsi-sumatera-utara-dalam-angka-2025.html

Holden, S. T. (2018). Fertilizer and sustainable intensification in Sub-Saharan Africa. *Global Food Security, 18*, 20–26. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.07.001

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementation of regional development information system (SIPD) in increasing coordination of regional development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 21–28. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061

Hamidah, S., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Distribution of subsidized fertilizer in Karawang regency. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(10), 156–166. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/1779

Irmalasari, L., Luthfi, M., & Baharuddin, B. (2024). Implementasi kebijakan pupuk subsidi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9*(1), 137–150. https://www.researchgate.net/publication/380764671_Implementasi_Kebijakan_Pupuk_Subsidi_di_Dinas_Tanaman_Pangan_Hortikultura_dan_Perkebunan_Kabupaten_Sinjai

Jayne, T. S., Mason, N. M., Burke, W. J., & Ariga, J. (2018). Review: Taking stock of Africa's second-generation agricultural input subsidy programs. *Food Policy, 75*, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.01.003

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Statistik konsumsi pangan tahun 2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/781

Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.

Kusuma, A., Wasistiono, S., & Pitono, A. (2021). Penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13*(4), 697–710. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1438/1/garuda2465502.pdf

Labolo, M. (2017). *Memahami ilmu pemerintahan* (8th ed.). RajaGrafindo Persada.

Liverpool-Tasie, L. S. O., Omonona, B. T., Sanou, A., & Ogunleye, W. O. (2017). Is increasing inorganic fertilizer use for maize production in SSA a profitable proposition? Evidence from Nigeria. *Food Policy, 67*, 41–51. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.011

Marenya, P. P., & Barrett, C. B. (2009). State-conditional fertilizer yield response on Western Kenyan farms. *American Journal of Agricultural Economics*, *91*(4), 991–1006. https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2009.01313.x

Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2024). *Dasar ilmu pemerintahan: Teori dan implementasi di Indonesia*. PT Media Penerbit Indonesia.

Nuryanti, T., Milla, A. N., & Astutiningsih, E. T. (2023). Efektivitas distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat petani di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Mahatani*, *6*(1), 163–176. https://journal.uniga.ac.id/index.php/MJA/article/view/2421

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44*(2), 81–106. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279

Rahmadhani, N. I., & A'ari, H. (2025). Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9*(1), 840–846. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24294

Sheahan, M., & Barrett, C. B. (2017). Ten striking facts about agricultural input use in Sub-Saharan Africa. *Food Policy, 67*, 12–25. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.010

Sembiring, S. A., Sitohang, M., Nainggolan, M. F., & Sinaga, E. D. (2024). Dampak kebijakan pupuk bersubsidi terhadap pendapatan bersih usahatani padi sawah berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Agriust*, *5*(1), 8–15. https://share.google/EuFdO9uJ0Y62ZH6Kp

Thahir, B. (2023). Memahami kebijakan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49*(1), 102–115. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133

Toana, A. A. (2018). Kepemimpinan situasional dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 1*(2), 91–102. https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1099